



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 karena adanya beberapa perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga diharapkan program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan dapat tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan menjadi acuan seluruh Bidang dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 15 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TW IITAHUN 2022	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	23
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

	Hal
II.1 Target dan Realisasi Anggaran per Program s.d TW II Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam	15
II.2. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam	17
III.1. Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2022 Dinas perhubungan Kota Batam	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Perubahan Renja, pada Perubahan Renja masih ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu Perubahan Rancangan Renja, Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Perubahan Renja.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang memuat analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja

Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD pada tahun berjalan. Adapun perubahan rancangan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2021; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Dengan kata lain renja perubahan perangkat daerah 2022 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022 dimulai dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022. Renja Perubahan tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Renja Perubahan perangkat daerah terkait.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
 - 10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87)
- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
- 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan);

- 45) Peraturan Walikota Batam Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Batam Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. EVALUASI HASIL CAPAIAN KINEJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun 2022 dan juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan.

Analisis capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2022 ini sudah mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra telah mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026 dan tentunya telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Batam menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat diserap sesuai yang direncanakan, sehingga sampai dengan triwulan II tahun 2022 dari pagu anggaran sebesar Rp.53.702.678.062,00 baru terealisasi sebesar Rp.19.832.512.899,00 atau sekitar 37% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Target dan Realisasi Anggaran per Program s.d TW II Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kota Batam

PROGRAM		PAGU 2022 Rp	RENCANA PENYERAPAN S.D TW II 2022 Rp	REALISASI S.D TW II 2022 Rp	% KEUANGAN
1	Pogram Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.198.303.835,00	14.116.765.768,00	10.378.636.242,00	37%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.922.199.007,00	10.231.551.639,00	8.518.337.323,00	45%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	6.582.174.820,00	1.050.543.000,00	935.539.334,00	14%
		53.702.677.662,00	25.398.860.407,00	19.832.512.899,00	37%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagaimana tertera pada Tabel II.2, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hampir semua program dan kegiatan belum menunjukkan hasil sebagaimana target yang ditetapkan, mengingat kegiatan pada triwulan II tahun 2022 ini masih berlangsung, bahkan beberapa pekerjaan masih dalam tahap pelaksanaan pengadaan.
2. Untuk Kegiatan **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** yang merupakan kegiatan penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) sampai dengan triwulan II tahun 2022 ini tidak dapat memenuhi target kinerja karena kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan mengingat adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun.
3. Kegiatan **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota** merupakan kegiatan yang melaksanakan pengoperasian kapal untuk melayani mobilitas masyarakat diwilayah hinterland. Kegiatan

ini sampai dengan triwulan II dan triwulan berikutnya sudah memenuhi target kinerja, karena kegiatan ini memiliki jumlah realisasi kinerja sama dengan target kinerja yaitu sebesar 66,67%, hal ini karena pengukuran kinerja berasal dari *Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut*, hingga saat ini jumlah pulau yang dilayani atau disinggahi oleh transportasi laut yang dikelola oleh UPT Pelayanan Transportasi Dinas Perhubungan masih berjumlah 20 pulau dari 30 pulau yang ditargetkan, hal ini juga diakibatkan karena tidak adanya penambahan armada untuk melayani mobilitas masyarakat di wilayah hinterland. Jumlah kapal yang dimiliki UPT Pelayanan Transportasi hanya berjumlah 1 (satu) unit kapal Sri Lengkang yang setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu melayani masyarakat di sekitar Kecamatan Galang dan 3 (tiga) unit Speedboat yang diperuntukkan untuk mobilitas masyarakat di Kecamatan Bulang.

4. Implikasi yang timbul akibat target program/kegiatan Renstra terhadap usulan-usulan masyarakat yang tidak dapat terakomodir yang disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan, tentu saja berakibat terhadap target RPJMD yang tidak dapat tercapai sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Batam dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel II.2 berikut :

Tabel II.2
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			476.900.593.113,39			47.011.080.846,00			76.687.048.292,00		53.702.678.062,00		7.474.240.601,00		19.832.512.899,00	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	178.472.592.363,00	Persentase	100	19.738.278.177,00	Persentase	100	31.276.638.368,00	100	28.198.303.835,00	22,04	4.248.040.280,00	54,73	10.378.636.242,00
	2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	80.413.492.746,00	Persentase	100	10.818.767.009,00	Persentase	100	14.107.462.189,00	100	11.819.112.723,00	100	1.972.740.370,00	50	5.193.740.222,00
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang/bulan	73	79.591.383.746,00	orang/bulan	73	10.672.567.009,00	orang/bulan	73	13.939.332.189,00	73	11.675.712.723,00	73	1.967.740.370,00	73	5.129.640.222,00
	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	822.109.000,00	Dokumen	14	146.200.000,00	Kegiatan	15	168.130.000,00	15	143.400.000,00	15	5.000.000,00	15	64.100.000,00
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	280.320.000,00	Persentase	100	0,00	Persentase	100	133.600.000,00						0,00
	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	320	280.320.000,00				unit	160	133.600.000,00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5			6			7			8		9			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	2.15.01.2.06.	Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	2.161.420.424,00	Persentase	100	324.022.400,00	Persentase	100	696.226.100,00	100	375.432.712,00		0,00	38,98	95.858.000,00
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	324.395.500,00	Paket	1	22.580.000,00	Paket	1	27.462.000,00	1	173.508.500,00	0	0,00	1	5.150.000,00
	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	535.246.924,00	Paket	2	103.429.000,00	Paket	6	123.454.800,00	6	65.201.712,00	0	0,00	1	50.389.000,00
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	219.799.000,00	Paket	1	168.030.000,00	Paket	1	303.600.000,00	1	6.600.000,00	0	0,00	0	1.800.000,00
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	132.214.700,00	Paket	1	29.983.400,00	Paket	1	34.971.500,00	1	19.082.500,00	0	0,00	0	17.950.000,00
	2.15.01.2.06.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	192	949.764.300,00	Laporan	0	0,00	Laporan	30	206.737.800,00	30	111.040.000,00	0	0,00	2	20.569.000,00
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	1.626.143.012,00	Persentase	100	190.615.328,00	Persentase	100	637.760.000,00	100	333.865.000,00		0,00	45,13	174.620.000,00
	2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	5	623.520.000,00	Unit		56.700.000,00	Unit	10	68.310.000,00	10	64.800.000,00	0	0,00	5	27.500.000,00
	2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	5	890.623.012,00	Unit		42.150.000,00	jenis	6	49.450.000,00	6	269.065.000,00	0	0,00	6	147.120.000,00
	2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Jenis)	Unit	-	112.000.000,00	Unit		91.765.328,00			520.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	16.551.147.100,00	Persentase	100	2.454.590.789,00	Persentase	100	3.143.190.235,00	100	2.594.413.400,00		592.711.411,00	52,5	1.304.887.834,00
2.15.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Jenis)	Jenis	4	5.419.451.500,00	Laporan	4	702.846.708,00	jenis	4	1.086.164.075,00	4	805.695.000,00	4	182.020.945,00	4	353.693.902,00
2.15.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	72	11.131.695.600,00	Laporan	13	1.751.744.081,00	Orang	43	2.057.026.160,00	43	1.788.718.400,00	43	410.690.466,00	43	951.193.932,00
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase	100	5.256.762.464,00	Persentase	100	858.567.295,00	Persentase	100	533.399.844,00	100	575.480.000,00		55.437.200,00	38,02	114.593.800,00
2.15.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3.928.807.000,00			316.629.750,00	Unit	99	292.611.060,00	99	573.080.000,00	0	54.837.200,00	40	113.393.800,00
2.15.01.2.09.02		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit		211.200.000,00			0,00									
2.15.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	8	1.116.755.464,00			541.937.545,00	Unit	1	240.788.784,00	1	2.400.000,00	0	600.000,00	1	1.200.000,00
2.15.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	Persentase	100	72.183.306.617,00	Persentase	90	5.091.715.356,00	Persentase	90	12.025.000.000,00	90	12.500.000.000,00	90	1.627.151.299,00	90	3.494.936.386,00
2.15.01.2.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	72.183.306.617,00	Unit Kerja	1	5.091.715.356,00	Unit kerja	1	12.025.000.000,00	1	12.500.000.000,00	1	1.627.151.299,00	1	3.494.936.386,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Persentase	100	213.996.270.870,00	Persentase	6%	24.696.398.471,00	Persentase	61	37.065.497.159,00	61	18.922.199.407,00	0%	2.930.774.221,00	0	8.518.337.323,00
2.15.02.2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Persentase	100	951.527.900,00						0,00	100	951.527.900,00	0%	0,00	0	0,00
2.15.02.2.01.01		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	951.527.900,00							1	951.527.900,00	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Persentase	100	21.301.820.126,00	Persentase	46	1.156.065.079,00	Persentase	100	4.506.176.450,00	100	1.556.515.600,00	0	12.900.000,00	28,41	298.114.935,00
2.15.02.2.02.01		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana jalan di jalan kabupten/kota yang terbangun	Unit	38	6.685.928.860,00	Unit	2	210.233.066,00	Unit	11	2.330.463.900,00	4	443.692.600,00	0	0,00	0	36.956.200,00
2.15.02.2.02.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		11.590.049.620,00	Unit	166	557.277.991,00	Unit	82	1.535.040.300,00	82	645.025.800,00	0	0,00	10	186.988.935,00
2.15.02.2.02.03		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.328.330.246,00	Unit	5	108.496.022,00	Unit	32	301.630.400,00	1	174.072.800,00	0	0,00	0	2.164.800,00
2.15.02.2.02.04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.697.511.400,00	Unit	55	280.058.000,00	Unit	1	339.041.850,00	1	293.724.400,00	0	12.900.000,00	0	72.005.000,00
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Persentase	100	40.352.733.534,00	Persentase	54	4.551.989.418,00	Persentase	63	11.909.341.165,00	63	4.093.492.763,00	54	0,00	54	680.417.400,00
2.15.02.2.06.02		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit		40.352.733.534,00	Unit	39	4.551.989.418,00	Unit	40	11.909.341.165,00	40	4.093.492.763,00	0	0,00	0	680.417.400,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Jumlah Jukir yang Melaksanakan Transaksi Non Tunai	Orang	400	53.861.917.100,00			1.227.044.880,00	Orang	0	1.662.858.600,00	0	1.445.953.100,00	0	217.961.240,00		725.404.480,00
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	Persentase	100	53.861.917.100,00	Persentase	70	1.227.044.880,00	Persentase	84	1.662.858.600,00	84	1.445.953.100,00	70	217.961.240,00	70	725.404.480,00
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Titik Parkir)	Laporan	720	53.861.917.100,00	Laporan	542	1.227.044.880,00	Laporan	598	1.662.858.600,00	598	1.445.953.100,00	589	217.961.240,00	594	725.404.480,00
			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	Persentase	80	16.187.518.090,00	Persentase	65		Persentase	73	1.528.479.950,00	73	881.197.834,00	17	0,00	32	138.580.000,00
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	Persentase	73	14.492.849.000,00	Persentase	49	1.064.692.500,00	Persentase	61	1.353.679.950,00	61	639.235.000,00	0	0,00	33,87	25.210.000,00
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jenis	84 Jenis	10.343.382.000,00	Paket	5	278.946.500,00	Jenis	2	435.861.500,00	2	49.235.000,00	0	0,00	2	25.210.000,00
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	set	72000 set	1.800.000.000,00	set	16.000	400.000.000,00	Dokumen	10000	460.000.000,00	10000	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jenis	4 Jenis	2.349.467.000,00	Paket	4	385.746.000,00	Unit	2	457.818.450,00	2	340.000.000,00	0	0,00	0	0,00
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	Persentase	100	1.694.669.090,00	Persentase	100	125.000.000,00	Persentase	100	174.800.000,00	100	241.962.834,00	30	0,00	60	113.370.000,00
	2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	406	1.694.669.090,00	Laporan	40 Laporan	125.000.000,00	Laporan	20	174.800.000,00	20	241.962.834,00	9	0,00	12	113.370.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5			6			7			8		9			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	Persentase	63	81.340.754.120,00	Persentase	38	16.571.606.594,00	Persentase	27	17.458.640.994,00	27	9.993.512.210,00	8	2.699.912.981,00	12	6.675.820.508,00
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Persentase	100	81.340.754.120,00	Persentase	80	16.571.606.594,00	Persentase	90	17.458.640.994,00	90	9.993.512.210,00	80	2.699.912.981,00	80	6.675.820.508,00
2.15.02.2.09.01		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang			81.340.754.120,00	Unit	56	16.571.606.594,00	Unit	9	17.458.640.994,00	9	9.993.512.210,00	5	2.699.912.981,00	5	6.675.820.508,00
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Persentase	49	84.431.729.880,39	Persentase	49	2.576.404.198,00	Persentase	49	8.344.912.765,00	49	6.582.174.820,00	9,2	295.426.100,00	15	935.539.334,00
2.15.03.2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Persentase	100	47.100.733.814,00	Persentase	66,67	1.655.779.300,00	Persentase	66,67	1.950.766.850,00	66,67	1.493.633.800,00	66,67	295.426.100,00	66,67	576.174.334,00
2.15.03.2.06.02		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Laporan	60	47.100.733.814,00	Laporan	4	1.655.779.300,00	Laporan	2	1.950.766.850,00	2	1.493.633.800,00	2	295.426.100,00	2	576.174.334,00
2.15.03.2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Persentase	100	37.330.996.066,39	Persentase	80	920.624.898,00	Persentase	100	6.394.145.915,00	100	5.088.541.020,00		0,00	30	359.365.000,00
2.15.03.2.12.02		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	Unit	11	33.628.994.550,17			920.624.898,00	Unit	1	2.300.000.000,00	2	4.845.651.250,00	0	0,00	0	323.687.000,00
2.15.03.2.12.03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	unit	34	3.702.001.516,23	Unit	5	920.624.898,00	Unit	3	4.094.145.915,00	1	242.889.770,00	0	0,00	1	35.678.000,00

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 memuat program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan dan subkegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang dirasionalisasi namun ada juga yang mengalami penambahan. Total pagu dana dalam rencana Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam menjadi Rp.55.276.215.797,08 atau naik sebesar 2,93% dari pagu dana APBD Murni sebesar Rp.53.702.408.062,00.

Pada Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan memiliki 3 (tiga) Program 16 (enam belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran atau rasionalisasi sebagaimana yang disajikan pada tabel III.1 sebagai berikut:

TABEL III.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PRHUBUNGAN KOTA BATAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target 2023	
02.15.		URUSAN : PERHUBUNGAN	URUSAN : PERHUBUNGAN					76,687,048,292.00	53,702,408,062.00	55,276,215,797.08						64,814,047,110.00	DISHUB	
02.15.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	31,276,638,368.00	28,198,303,835.00	24,641,053,835.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27,494,091,410.00	DISHUB	
02.15.01.2.02.		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	14,107,462,189.00	11,819,112,723.00	11,844,312,723.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,409,387,510.00	DISHUB	
02.15.01.2.02.01		SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	73 Orang	13,939,332,189.00	11,675,712,723.00	11,675,712,723.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	73 Orang/bulan	13,243,067,510.00	DISHUB
02.15.01.2.02.03		SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Tahun	1 Tahun	168,130,000.00	143,400,000.00	168,600,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	32 Dokumen	166,320,000.00	DISHUB
02.15.01.2.05.		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	133,600,000.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		265,224,000.00		
02.15.01.2.05.02		SUB KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		160 Stel	160 Stel	133,600,000.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	172 Paket	127,036,000.00	
02.15.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	00.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	10 Orang	138,188,000.00	
02.15.01.2.06.		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	696,226,100.00	375,432,712.00	325,382,712.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		259,861,300.00	DISHUB	
02.15.01.2.06.01		SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Lampu Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Tahun	5 Jenis	27,462,000.00	173,508,500.00	173,508,500.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1 Paket	8,386,000.00	DISHUB
02.15.01.2.06.02		SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK dan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Tahun	34 Jenis	123,454,800.00	65,201,712.00	65,201,712.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	5 Paket	83,143,500.00	DISHUB

Kode	Usuran/Bidang Usuran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah		Target 2023	Pagu Indikatif	
02.15.01.2.06.04	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya BBM	Jumlah Paket Bahan Kendaraan Dinas		1 Tahun	1 Jenis	303,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2 Paket	19,100,000.00	DISHUB
02.15.01.2.06.05	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang- Barang Cetak dan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 Tahun	6 Jenis	34,971,500.00	19,082,500.00	19,082,500.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	24,486,800.00	DISHUB
02.15.01.2.06.09	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya SPPD Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	20 Kali	206,737,800.00	111,040,000.00	60,990,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	38 Laporan	124,765,000.00	DISHUB
02.15.01.2.07.	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	637,760,000.00	333,865,000.00	301,465,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,198,126,400.00	DISHUB
02.15.01.2.07.02	SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	00.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	2 Unit	737,480,000.00	
02.15.01.2.07.05	SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebeleur	SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	1 Jenis	68,310,000.00	64,800,000.00	32,400,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	22 Unit	103,430,000.00	DISHUB
02.15.01.2.07.06	SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Paket	5 Jenis	49,450,000.00	269,065,000.00	269,065,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	38 Laporan	357,216,400.00	DISHUB
02.15.01.2.07.09	SUB KEGIATAN : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SUB KEGIATAN : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung dan Taman Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 paket	-	520,000,000.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
02.15.01.2.08.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	3,143,190,235.00	2,594,413,400.00	2,594,413,400.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,717,737,400.00	DISHUB
02.15.01.2.08.02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Rekening Listrik, Air, Telp dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Tahun	4 Jenis	1,086,164,075.00	805,695,000.00	805,695,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa	4 Laporan	805,695,000.00	DISHUB
02.15.01.2.08.04	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji dan Tunjangan THL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Tahun	43 Orang	2,057,026,160.00	1,788,718,400.00	1,788,718,400.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa	12 Laporan	1,912,042,400.00	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target 2023	Pagu Indikatif		
02.15.01.2.09.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	533,399,844.00	575,480,000.00	575,480,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					685,560,000.00	DISHUB	
02.15.01.2.09.02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Pembayaran Pajak Kendaraan 2. Pemeliharaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Paket	1. 63 Unit 2. 19 Unit	292,611,060.00	573,080,000.00	573,080,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milk Daerah	6 Unit	631,630,000.00	DISHUB	
02.15.01.2.09.06	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	00.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milk Daerah	6 Unit	51,530,000.00		
02.15.01.2.09.09	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Paket	6 Jenis	240,788,784.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milk Daerah	1 Unit	2,400,000.00	DISHUB	
02.15.01.2.10.	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	90%	90%	12,025,000,000.00	12,500,000,000.00	9,000,000,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8,958,194,800.00	DISHUB	
02.15.01.2.10.01	SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Tahun	4 Koridor	12,025,000,000.00	12,500,000,000.00	9,000,000,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan	1 Unit Kerja	8,958,194,800.00	DISHUB	
02.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	100%	100%	100%	37,065,497,159.00	18,921,929,407.00	24,052,987,142.08	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29,460,332,150.00	DISHUB	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	5.211 Unit	5.211 Unit	5.211 Unit													
02.15.02.2.01.	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	0	100%	100%	00.00	951,257,900.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					00.00	DISHUB	
02.15.02.2.01.01	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	1 Dokumen	00.00	951,257,900.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Perencanaan	-	00.00	DISHUB	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah	
	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target 2023	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
02.15.02.2.02.	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA		Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	10%	10%	4,506,176,450.00	1,556,515,600.00	1,031,632,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4,948,065,500.00	DISHUB
02.15.02.2.02.01	SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1. Pembangunan Halte 2. Pembangunan Transfer Point	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		1. 10 Unit 2. 1 Unit	1. - 2. - 3. Pedestrian 183 m2 4. Halte 5 Unit	2,330,463,900.00	443,692,600.00	37,881,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	4 Unit	891,824,900.00	DISHUB
02.15.02.2.02.02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1. Canstin 2. Marka Jalan 3. Papan Nama Jalan 4. Rambu Lain Standar 5. Pita Penggadu 6. Rambu Type F 7. RPPJ 8. Zona Selamat Sekolah	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1. 1000 m 2. 1000 m2 3. 100 Unit 4. 100 Unit 5. 160 m2 6. 10 Unit 7. 10 Unit 8. 2 Lokasi	1. 300 m 2. - 3. - 4. 50 Unit 5. - 6. 5 Unit 7. 5 Unit 8. - 9. Guadrail 100 m 10. Rambu Elektronik 5 Unit	1,535,040,300.00	645,025,800.00	525,953,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	214 unit dan 7,1 km	3,306,499,600.00	DISHUB
02.15.02.2.02.03	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1. Rehab Halte 2. Rehab JPO	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		1. 30 Unit 2. 2 Unit	1. 1 Unit 2. -	301,630,400.00	174,072,800.00	174,072,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	16 Unit	396,070,000.00	DISHUB
02.15.02.2.02.04	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan		Rehab Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		70%	1. Papan Nama Jalan 5 Unit 2. Rambu Standart 25 Unit 3. RPPJ 5 Unit	339,041,850.00	293,724,400.00	293,724,400.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	125 Unit	353,671,000.00	DISHUB
02.15.02.2.04.	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	100%	84%	84%	1,662,858,600.00	1,445,953,100.00	1,871,250,100.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,164,093,100.00	DISHUB
02.15.02.2.04.02	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Titik Parkir yang Dikelola	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		668 Titik Lokasi Parkir	598 Titik Lokasi Parkir	1,662,858,600.00	1,445,953,100.00	1,871,250,100.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan Parkir	628 Laporan	2,164,093,100.00	DISHUB
02.15.02.2.05.	KEGIATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	KEGIATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		Persentase Operasional Pelayanan PKB	Persentase Operasional Pelayanan PKB	73%	61%	61%	1,353,679,950.00	639,235,000.00	639,235,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					693,239,000.00	DISHUB
02.15.02.2.05.01	SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		100%	16 Jenis	435,861,500.00	49,235,000.00	49,235,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Wajib Uji	11 Unit	51,739,000.00	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target 2023	Pagu Indikatif			
02.15.02.2.05.04	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji yang Tersedia	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		16000 set	10000 set	460,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Wajib Uji	10000 Dokumen	257,500,000.00		DISHUB		
02.15.02.2.05.07	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		1 Tahun	3 Jenis	457,818,450.00	340,000,000.00	340,000,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Wajib Uji	3 Unit	384,000,000.00		DISHUB		
02.15.02.2.06.	KEGIATAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATENKOTA	KEGIATAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATENKOTA	Persentase Ketersediaan APILL di Pempingangan Jalan Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Pempingangan Jalan Kota	100%	63%	63%	11,909,341,165.00	4,093,492,763.00	6,342,786,878.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7,606,382,300.00		DISHUB		
02.15.02.2.06.02	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Pembangunan APILL 2. Pemeliharaan APILL	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		1. 3 Lokasi 2. 40 Lokasi	1. 1 Lokasi 2. 36 Lokasi 3. Marka Jalan 1640 m2 4. Pita Penggadah 180 m2 5. ZoSS 732 m2 6. Relokasi APILL 2 Lokasi 7. Warning Light 2 Unit	11,909,341,165.00	4,093,492,763.00	6,342,786,878.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	2 Unit dan 2935 M2	7,606,382,300.00		DISHUB		
02.15.02.2.08.	KEGIATAN AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	KEGIATAN AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100%	100%	100%	174,800,000.00	241,962,834.00	213,462,834.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					264,000,000.00		DISHUB		
02.15.02.2.08.04	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas 2. Pelaksanaan Razia Angkutan Orang / Barang	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor		1. 1 Tahun 2. 20 Kali	1. 30 Kali 2. 20 Kali	174,800,000.00	241,962,834.00	213,462,834.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Angkutan Umum dan Barang	60 Laporan	264,000,000.00		DISHUB		
02.15.02.2.09.	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah KABupaten/Kota	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah KABupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	90%		17,458,640,994.00	9,993,512,210.00	13,954,619,530.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13,784,552,250.00		DISHUB		
02.15.02.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah KABupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah KABupaten/Kota	1. Pengoperasian Bus Sekolah 2. Pengoperasian TRans Batam	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		1. 1 Tahun 2. 1 Tahun	1. - 2. 3 Koridor	17,458,640,994.00	9,993,512,210.00	13,954,619,530.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan Bus Trans Batam	50 Unit	13,784,552,250.00		DISHUB		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target 2023		Pagu Indikatif
02.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	49%	49%	8,344,912,765.00	6,582,174,820.00	6,582,174,820.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,859,623,550.00	DISHUB	
02.15.03.2.06.	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	20 Pulau	20 Pulau	1,950,766,850.00	1,493,633,800.00	1,493,633,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,706,129,800.00	DISHUB	
02.15.03.2.06.02.	SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengoperasian Kapal di Wilayah Hinterland	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Tahun	20 Pulau	1,950,766,850.00	1,493,633,800.00	1,493,633,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang Merata Berkualitas dan Berkesinambungan di Mainland dan Hinterland	Sarana dan Prasarana Laut	2 Laporan	1,706,129,800.00	DISHUB
02.15.03.2.12.	KEGIATAN Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	KEGIATAN Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100%	100%	6,394,145,915.00	5,088,541,020.00	5,088,541,020.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,153,493,750.00	DISHUB	
02.15.03.2.12.02.	SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan Dermaga	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		1 Unit	3 Unit	2,300,000,000.00	4,845,651,250.00	4,845,651,250.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Sarana dan Prasarana Laut	3 Unit	4,677,944,750.00	DISHUB
02.15.03.2.12.03.	SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bangunan dan Dermaga Yang Terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		3 Unit	1 unit	4,094,145,915.00	242,889,770.00	242,889,770.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Sarana dan Prasarana Laut	7 Unit	1,475,549,000.00	DISHUB

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2022, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2022 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Batam.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Batam. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Batam.